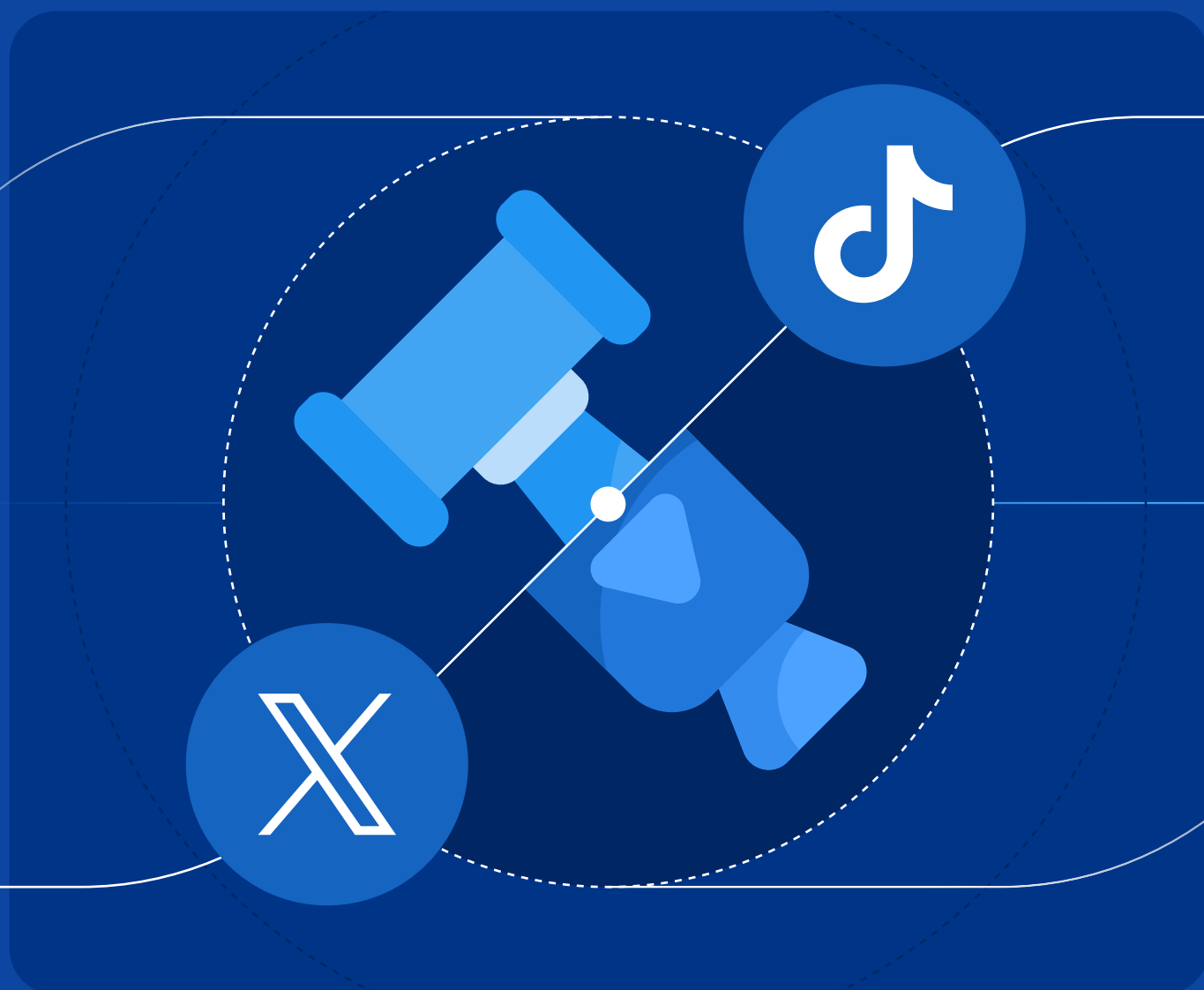
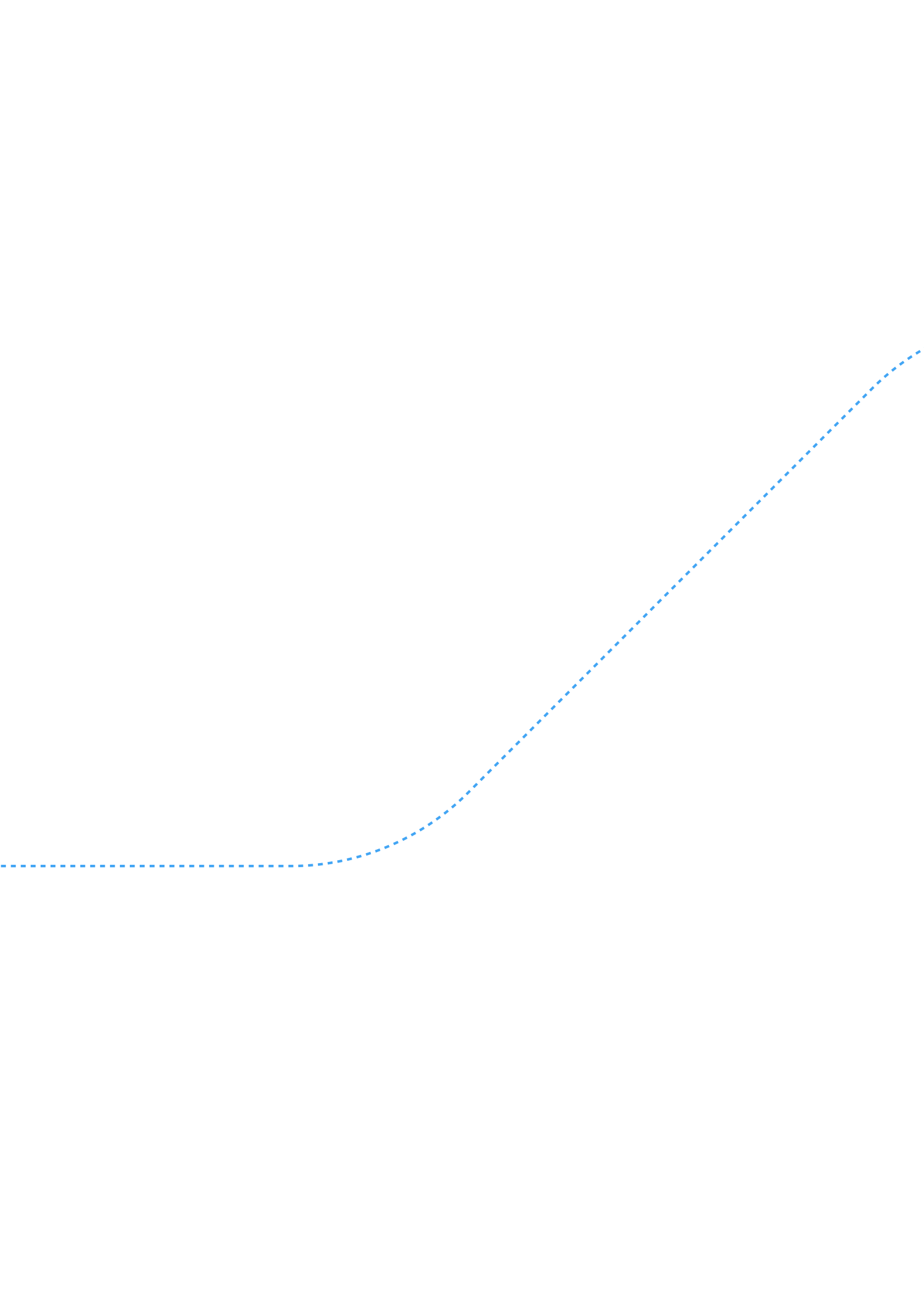


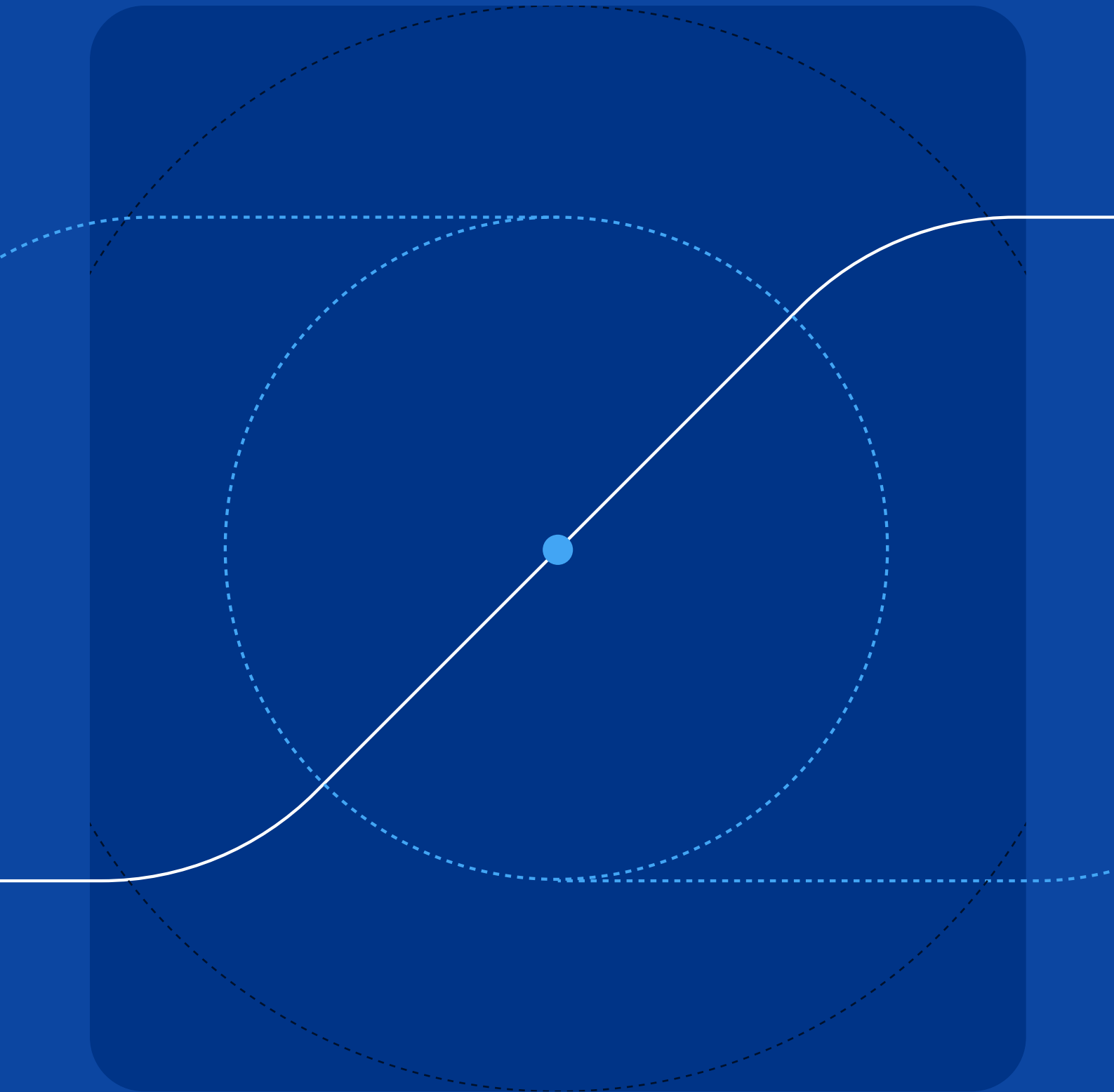


Dua Platform, Satu Kekhawatiran

Percakapan Warganet tentang RUU Penyiaran
di X dan TikTok







Peneliti
Bangkit Adhi Wiguna | Muhammad Ilyan Faris

Desainer Grafis & Tata Letak
Semeion Bintang Ridho Aunillah



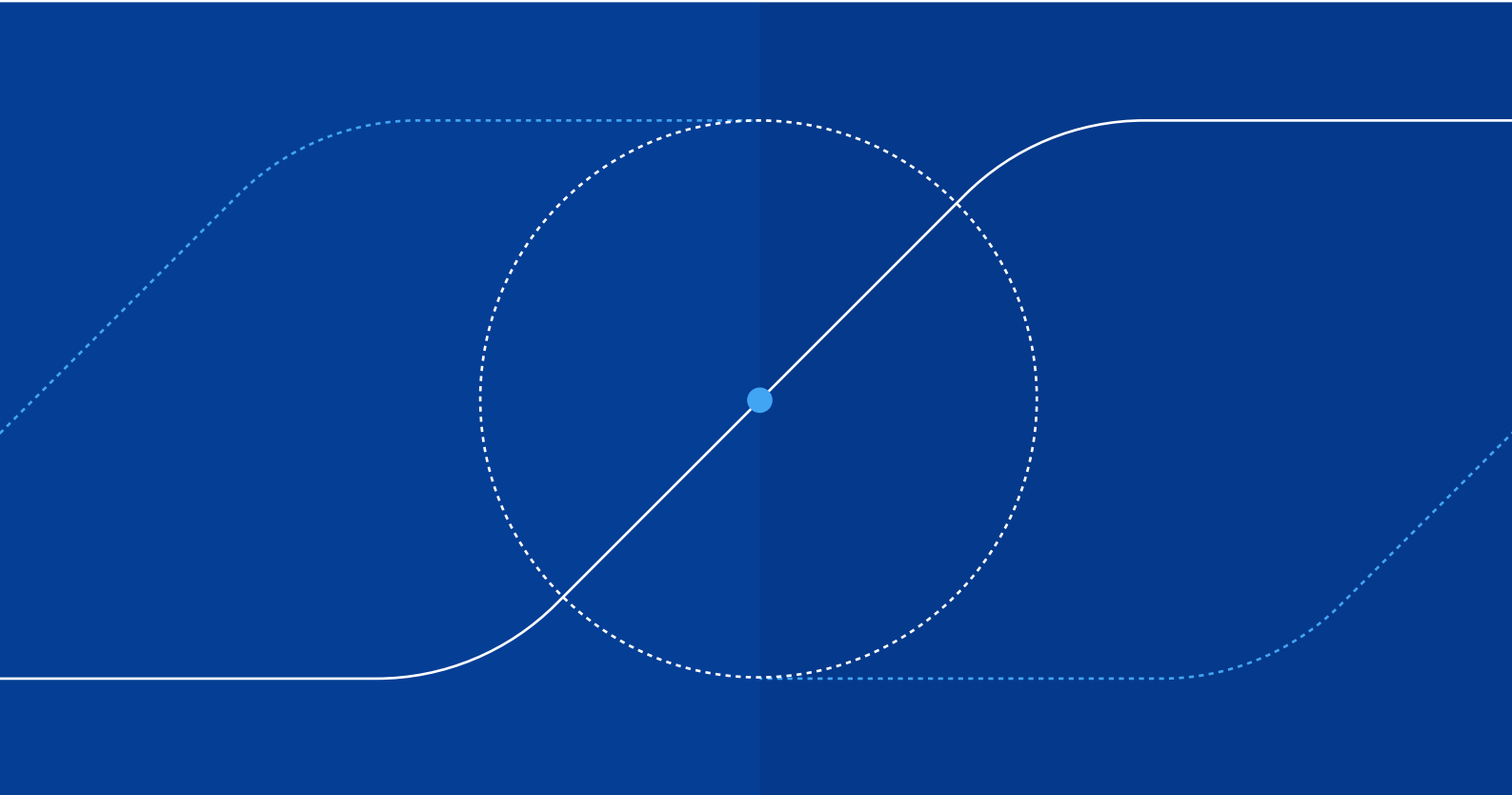
Daftar Isi

03	Pendahuluan
06	Koneksi dan Diskoneksi Isu di X
17	Mobilisasi Isu oleh Kreator Konten di TikTok
26	Kesimpulan
28	Referensi

00



Pendahuluan



Diskusi tentang RUU Penyiaran bersirkulasi di internet selama satu tahun terakhir. Kebocoran draf pada Maret 2024, yang memuat beberapa kontroversi utama seperti pelarangan jurnalisme investigasi dan perluasan wewenang KPI, merupakan momen kritis yang memulai diskusi tersebut. Tulisan ini secara spesifik mencoba untuk menganalisis tren, sentimen, dan topik perbincangan tentang RUU Penyiaran di internet selama satu tahun terakhir. Warganet, yang merupakan salah satu kelompok paling rentan terdampak RUU Penyiaran, hampir tidak pernah dilibatkan dalam perumusan RUU Penyiaran. Oleh karena itu, pemetaan respons warganet terhadap RUU tersebut menjadi hal yang penting.

X dan TikTok merupakan dua platform yang menjadi fokus analisis dalam tulisan ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, keduanya merupakan platform yang sama-sama memiliki potensi besar terdampak pengaturan RUU Penyiaran. X merupakan platform yang kerap menjadi medium diskusi kritis mengenai kebijakan pemerintah, substansi konten yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan RUU Penyiaran. Sementara itu, TikTok merupakan platform yang menjadikan konten audiovisual, jenis konten spesifik yang ingin diatur RUU Penyiaran, sebagai sajian utamanya. Analisis terhadap kedua platform ini, dengan demikian, penting untuk dilakukan karena keduanya memiliki risiko yang besar dari pengaturan RUU Penyiaran.

Kedua, keduanya merepresentasikan kelompok warganet dengan karakteristik yang cukup berbeda. Dalam pengelaran Pemilu 2024 (Rahminta, 2024) yang lalu, sebuah riset menunjukkan bahwa warganet X lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang menyalahi prosedur pemilu demokratis, sementara TikTok cenderung mendukung. Riset lain bahkan menemukan analisis yang lebih ekstrem. Reuters Institute, misalnya, menemukan bahwa X merupakan platform dengan proporsi warganet dengan gelar pendidikan tinggi paling besar, sementara TikTok paling rendah (Rahminta, 2024). Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap cara dua kelompok warganet dari kedua platform tersebut dalam menyikapi sebuah isu. Berdasarkan berbagai perbedaan karakteristik tersebut, analisis terhadap kedua platform tersebut menjadi penting karena keduanya mampu menyajikan perspektif yang kaya dan beragam.

Analisis dalam tulisan ini akan menyajikan data yang diambil dan dianalisis dengan metode riset campuran. Analisis tulisan ini akan menggabungkan data agregat tentang tren, sentimen, dan topik pembicaraan warganet di X dan TikTok. Data-data agregat ini dianalisis dengan metode *computational social science* yang dibantu oleh beberapa model machine learning yang sudah di-train sebelumnya, seperti IndoBERT untuk analisis sentimen bahasa Indonesia dan BERTopic untuk pemetaan dan klasifikasi topik pembicaraan. Khusus untuk platform X, kami juga melakukan *social network analysis* menggunakan Gephi untuk memetakan persebaran aktor. Analisis yang bersifat agregat ini kemudian diteruskan dengan analisis mendalam terhadap beberapa percakapan khusus yang mampu memperkaya dan memperdalam analisis agregat.

Secara garis besar, tulisan ini menemukan bahwa kedua platform media sosial memiliki karakteristik mobilisasi isu yang berbeda. Perbincangan tentang RUU Penyiaran di X menunjukkan adanya koneksi dan diskoneksi isu. RUU Penyiaran di X kerap dibicarakan secara bersamaan dengan kebijakan pemerintah kontroversial lainnya. Ia nyaris tak pernah berdiri sendiri. Hal ini membuat topik pembicaraan tentang RUU Penyiaran di X agak sulit dipetakan dan cenderung tercampur-campur dengan narasi kebijakan lain. Meskipun demikian, sentimen terhadap RUU Penyiaran cukup tersebar dan tidak koheren, menunjukkan adanya diskoneksi. Ketersebaran sentimen ini disebabkan salah satunya oleh kehadiran pendengung (buzzer) yang mencoba untuk melawan balik kritik terhadap RUU Penyiaran selama satu tahun terakhir.

Kategori Pembandingan	Platform X (Twitter)	Platform TikTok
<i>Karakteristik Utama</i>	Koneksi dan Diskoneksi Isu Isu cenderung saling terhubung namun sentimennya terpecah.	Mobilisasi Isu Masif Gerakan lebih terorganisir dan besar-besaran.
<i>Fokus Pembicaraan</i>	Tercampur/Melebur Kerap dibicarakan bersamaan dengan kebijakan kontroversial lain; nyaris tidak pernah berdiri sendiri.	Terfokus/Spesifik Fokus mengkritik dampak RUU (kebebasan berekspresi & akses); tidak bercampur dengan isu lain.
<i>Pemetaan isu</i>	Sulit Dipetakan Topik cenderung tercampur dengan narasi kebijakan lain.	Jelas dan Terpetakan Karena lebih terkoordinasi, arah pembicaraan lebih mudah dipetakan.
<i>Aktor Penggerak</i>	Warganet dan Buzzer Terdapat <i>buzzer</i> yang aktif melawan balik kritik, menyebabkan diskoneksi.	Kreator dan Media Dikomandoi oleh kreator konten dan akun-akun media pemberitaan.
<i>Koherensi Sentimen</i>	Tersebar dan Tidak Koheren Sentimen terpecah, sebagian karena intervensi <i>buzzer</i> .	Terkoordinasi Lebih satu suara dalam penolakan dan kekhawatiran terhadap RUU.

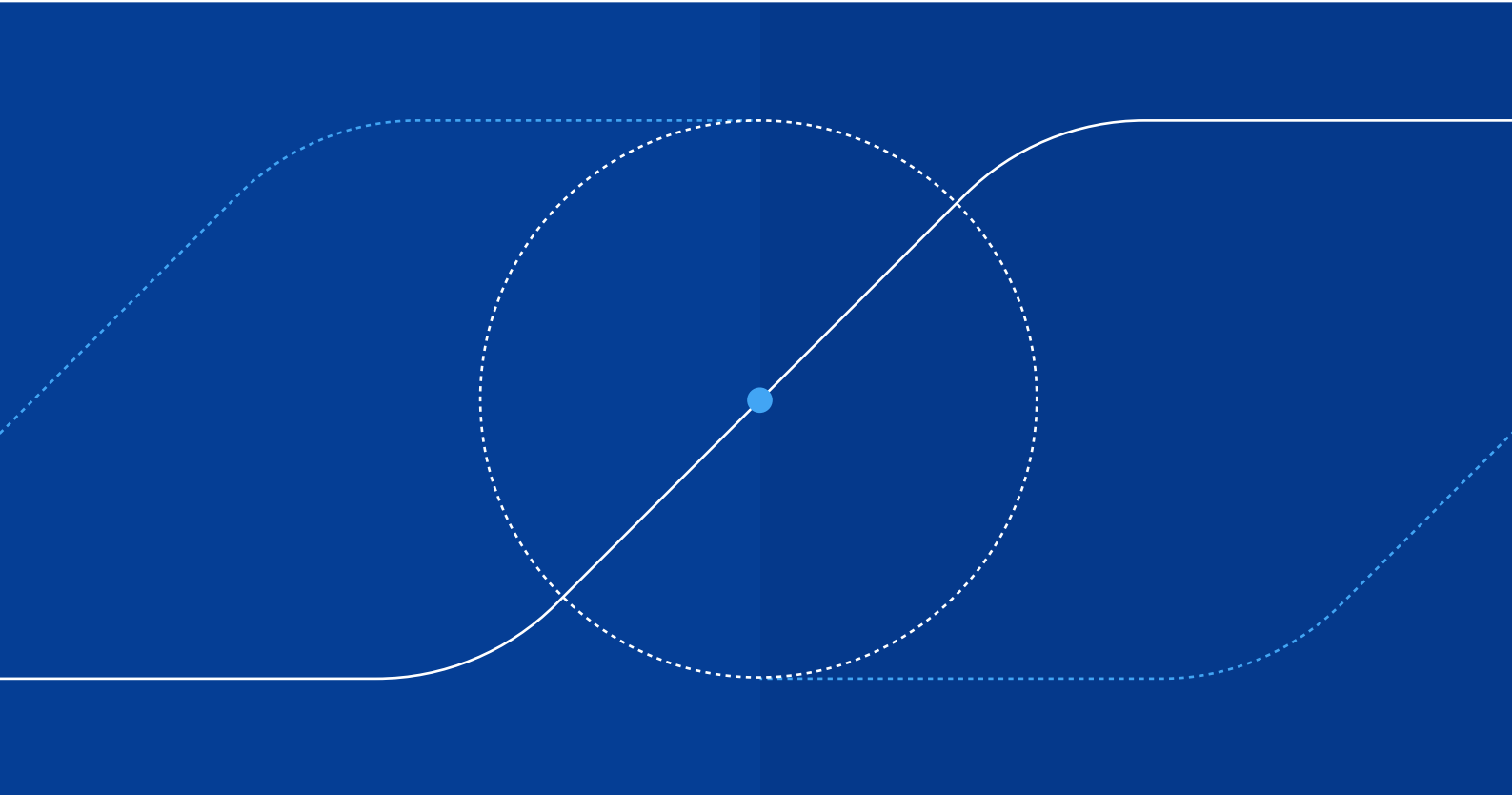
Tabel 1. Perbandingan Diskusi Publik tentang RUU Penyiaran di X dan TikTok

Sumber: Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (2025)

Berbeda dengan X yang dicirikan oleh koneksi dan diskoneksi, perbincangan tentang RUU Penyiaran di TikTok dicirikan oleh mobilisasi isu masif yang dikomandoi oleh kreator konten dan akun-akun media pemberitaan. Karena lebih terkoordinasi, perbincangan tentang RUU Penyiaran di TikTok lebih terpetakan secara jelas dan tidak bercampur dengan isu kebijakan kontroversial lainnya. Warganet di TikTok fokus mengkritik RUU Penyiaran mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan akses terhadap platform. Dalam beberapa diskusi, beberapa komentar menautkan RUU Penyiaran dengan kebijakan kontroversial lain, yang kemudian dikaitkan dengan narasi besar tentang kemunduran negara dalam mengatur platform. Beberapa komentar juga menunjukkan adanya dukungan dan kekhawatiran terhadap kreator konten yang aktif bersuara tentang RUU Penyiaran.



Koneksi dan Diskoneksi Isu di X



X menjadi sosial media yang cukup populer di Indonesia. Pada Oktober 2025, X tercatat memiliki 22.92 juta pengguna di Indonesia (Statista, 2025), yang menempatkannya sebagai negara dengan jumlah pengguna terbanyak ketiga setelah Jepang dan Amerika Serikat. Namun, X sendiri tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia (Gisela, 2025). Sejak restrukturisasi X (dulu Twitter) oleh Elon Musk, kantor perwakilan X di beberapa negara telah ditutup. Hal ini menyebabkan frustrasi di pemerintahan (Setyowati, 2025). Apabila dibandingkan dengan Meta dan Google yang mempunyai kantor perwakilan, X cenderung menjadi platform yang sulit untuk berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah. Selain itu, X melanggar beberapa regulasi yang ada di ranah digital Indonesia seperti pelanggaran moderasi konten pornografi (Komdigi, 2025). Minimnya perwakilan X di Indonesia menghasilkan kesulitan untuk penegakan hukum terhadap platform tersebut hingga Komdigi-pun menerbitkan Surat Teguran ketiga perihal pelanggaran tersebut dan kenaikan denda hingga Rp78.125.000 (Hukumonline, 2025).

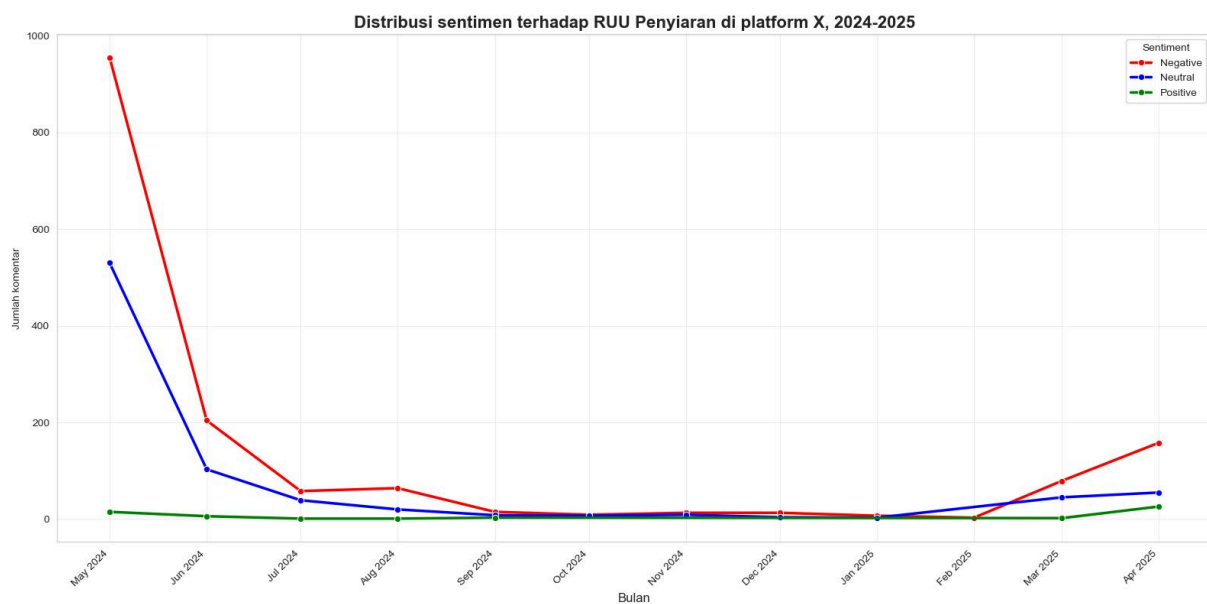
Indonesia tidak sendiri, pada 5 Desember 2025, Uni Eropa mengenakan sanksi denda sebesar 120 juta Euro karena pelanggaran aturan konten online. Sanksi ini berasal dari investigasi selama dua tahun yang dilakukan Uni Eropa dibawah Digital Services Act. Sanksi tersebut meliputi kegagalan X dalam menanggapi fitur tanda centang biru yang seringkali menipu publik dan menyebarkan disinformasi, kurangnya transparansi dalam iklan yang ada di X, serta kegagalan pemberian akses data publik terhadap para peneliti (European Commission, 2025). Sifat non konformis terhadap regulasi negara oleh X ini menjadi suatu rintangan berat, terutama untuk negara-negara yang pengguna X-nya cukup banyak seperti Indonesia.

Indonesia nyatanya bersikeras mengenai larangannya terhadap pornografi dan generasi konten porno berbasis AI di X. Selain itu, pinjol atau pinjaman online juga menjadi kekhawatiran pemerintah. Diseminasi pinjol sering terjadi di X dan kadang-kala berada atau digabungkan dengan konten pornografi (Risfil, 2025). Di lain sisi, X menjadi media sosial dimana penggunaanya banyak yang cenderung kontra atau oposisi terhadap pemerintah. Sebagai contoh, sebuah analisis tren percakapan perihal pemberian gelar Pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto dari berbagai platform menunjukan semua merespon positif, kecuali di X (Fahmi, 2025). Nyatanya X menjadi media sosial yang penting dalam diskusi publik dan demokrasi Indonesia.

Ramainya percakapan publik terhadap RUU Penyiaran memiliki arus yang cukup stabil dengan minimnya fluktuasi. Meskipun cukup stabil, terdapat penurunan distribusi yang cukup drastis. Gambar 4 mengilustrasikan lini masa tren yang telah direkam dari Mei 2024 hingga April 2025. Lini masa terkait menunjukan laju sentimen negatif, netral, dan positif terhadap RUU Penyiaran itu sendiri, serta kapan sentimen-sentimen perihal RUU Penyiaran tersebut ramai dibicarakan di platform X di waktu tertentu.



Sumber gambar: Antara News

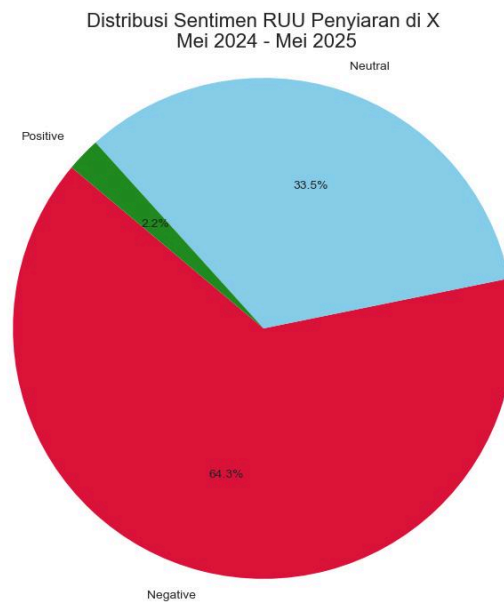


Gambar 1. Distribusi Sentimen Percakapan di Platform X, 2024-2025

Draf RUU Penyiaran bocor ke publik pada bulan Maret 2024, kemudian percakapan seputar RUU Penyiaran di platform X mencapai puncak pembicaraan pada bulan Mei 2024, bertepatan pada awal penyebaran draf RUU Penyiaran. Respons publik bersentimen negatif ditemukan paling banyak, diikuti dengan sentimen netral. Di bulan ini, selain tersebarnya draf RUU terkait, terdapat pula banyak kritik dan demonstrasi perihal penolakan revisi UU Penyiaran di waktu yang sama. Kemudian frekuensi sentimen menurun drastis di bulan Juni di tahun yang sama.

Sempat terdapat lonjakan sentimen negatif di bulan Agustus di waktu yang sama di mana gerakan massal Peringatan Darurat (Garuda Biru) #KawalPutusanMK yang memprotes berbagai macam isu terutama RUU Pilkada 2024 muncul. Kemudian laju sentimen kembali melandai dan stabil hingga Januari 2025 di mana ditemukan bahwa RUU Penyiaran kembali dibicarakan dengan sentimen netral yang menaik. Kemudian diikuti dengan kenaikan sentimen negatif di bulan Februari dan kenaikan sentimen positif di bulan Maret 2025. Naiknya pembicaraan RUU Penyiaran di paruh pertama 2025 ini dipicu oleh keterkaitannya terhadap isu lain yang sedang ramai dibahas kala itu. Perbincangan RUU Penyiaran selama empat bulan dari September 2024 hingga Januari 2025 cukup redup di X bertepatan dengan redupnya momentum gerakan Garuda Biru. Meskipun minim, tetap ada yang membahasnya dalam bentuk diskusi, kritik, dan dukungan yang mendapat engagement kecil.

Warganet di X memiliki opini beragam perihal RUU Penyiaran. Akan tetapi, dari Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat bahwasanya sentimen negatif menjadi sentimen yang dominan dalam pembahasan RUU tersebut. Menggunakan algoritma analisis IndoBERT, terdapat 2457 postingan perihal RUU Penyiaran dari 1 Mei 2024 hingga 30 April 2025. Terlihat di Gambar 5 bahwa pembahasan RUU Penyiaran di X memiliki sentimen negatif sebesar 64.3%, sentimen netral dengan 33.5% dan sentimen positif menjadi yang paling sedikit dengan 2.2% dari keseluruhan pembahasan RUU tersebut.



Gambar 3. Salah satu headline pemberitaan RUU Penyiaran di Tempo.co

Sumber: Tempo.co

Mendalami sentimen negatif tersebut, mayoritas kata-kata yang ditemukan berkaitan dengan RUU Penyiaran itu sendiri, seperti “jurnalis”, “creator”, “konten” dan kata lainnya yang berputar pada RUU terkait. Ditemukan juga bahwa perbincangan RUU Penyiaran di X, seringkali meliputi perbincangan hal lain. Gambar 3 menunjukan kata-kata seperti “Polri” yang merujuk pada RUU Polri, “TNI” yang merujuk pada RUU TNI, dan “Tapera” serta kritik terhadapnya.



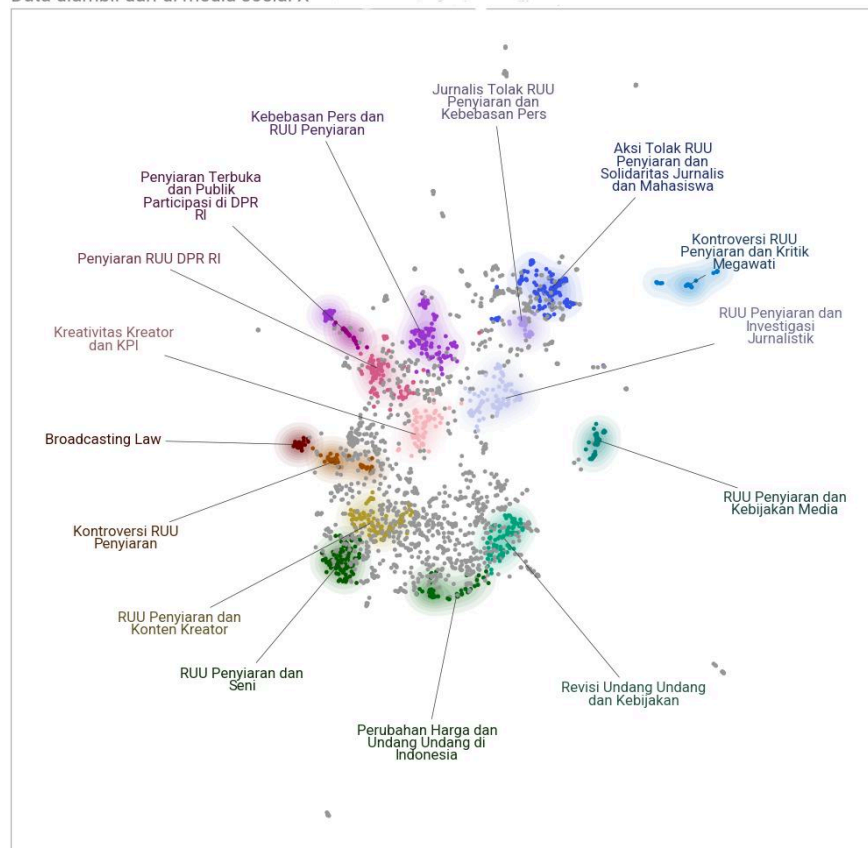
Gambar 3. Wordcloud Sentimen Negatif di X

Sumber: Kompas.com

Menggunakan Model BERTopic, kami mendalami topik perbincangan lainnya yang kerap kali dipasangi oleh pembicaraan RUU Penyiaran. Terlihat di Gambar 4, bahwa pembicaraan yang kebersamainya perbincangan RUU Penyiaran meliputi berbagai macam isu. Paling banyak merupakan isu yang juga populer di waktu yang sama saat RUU Penyiaran dibicarakan. Seperti isu RUU Polri, TNI, Tapera dan isu UKT. Kemudian diikuti isu ancaman terhadap kebebasan pers, isu teknis yang mengitari RUU Penyiaran, dan respons berbagai macam pihak seperti politisi, mahasiswa, dan media.

Topik Perbincangan RUU Penyiaran

Data diambil dari di media sosial X



Gambar 4. Topik Perbincangan RUU Penyiaran di X, 2024-2025

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
Keterkaitan dengan Isu Lain: RUU Polri, TNI, Tapera, & UKT	175	1. 'ada banyak masalah di negara ini, kenaikan UKT yang akhirnya ditunda tapi tahun depan bakal naik, RUU penyiaran, RUU TNI dan Polri, Tapera, PPN juga mau naik jadi 12%, kenaikan tarif listrik dan BBM dll.

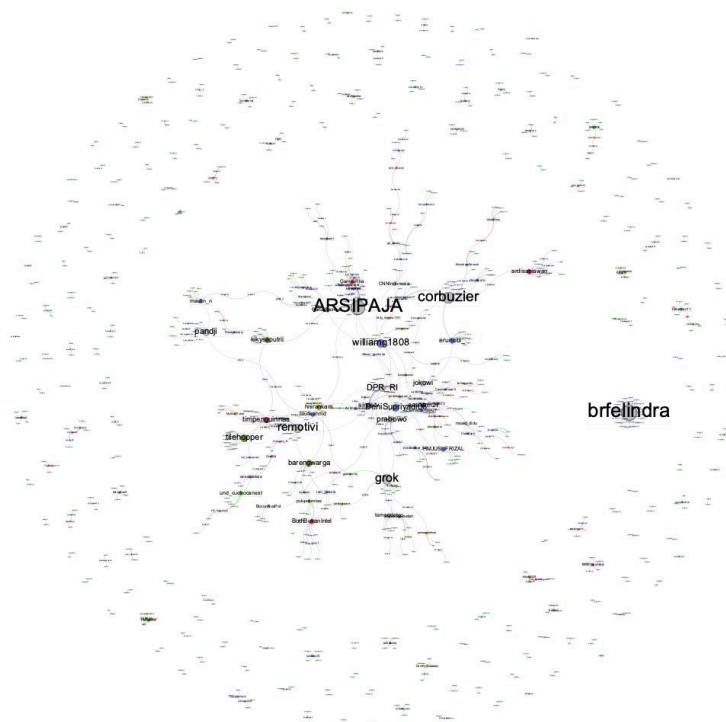
Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
		tapi kalian masih aja ngeributin makan bubur ayam itu diaduk atau enggak', 2. 'ruu polri? ruu penyiaran? tapera?? ukt naik??? keberlanjutan??', 3. 'Banyak banget ya fokus rakyat dipecah - ppn 12% - UKT - Tapera - RUU Penyiaran - RUU TNI - RUU Polri'
<i>Ancaman Kebebasan Pers</i>	119	1. 'Masyarakat dan pers beraksi damai menolak semua pasal pembungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di RUU Penyiaran.', 2. 'Pasal mana saja dari RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers? Pasal 50 B Ayat (2) dalam RUU Penyiaran dinilai akan mengancam kebebasan pers. Pasal itu memuat Standar Isi Siaran yang salah satu poinnya adalah huruf c melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.', 3. 'Draf RUU Penyiaran terbaru menjadi kontroversi karena dianggap akan mengancam kebebasan pers, membatasi informasi publik, hingga membatasi keberagaman konten di ruang digital. Utas ini akan membahas: - Pasal mana saja dari Rancangan Undang Undang (RUU) Penyiaran yang mengancam kebebasan pers? - Di mana pasal dalam RUU Penyiaran yang memberi kewenangan lebih kepada KPI? - Sampai sejauh mana pembahasan RUU Penyiaran? - Sudahkah perumusan Draf RUU ini melibatkan publik? - Bagaimana sikap Dewan Pers terhadap RUU Penyiaran?
<i>Kritik Prioritas Legislasi dan Sarkasme</i>	117	1. 'ruu penyiaran penting? woi yang bener aja lah. sengaja bgt mau ngebatesin peran pers ya? ruu mha sama ruu pppt mana nih? kan penting? udah 20 taun nih bos??????', 2. 'tolol ntar ga ruu pilkada aja yang disahin, ruu penyiaran juga bisa disahin anjir lu mau nonton gepeng lu di mana kalo dah dibatasin???? fomo ya ga apa asalkan buka suara daripada kek lu cem buzzer diketawain himmel lu dari kubur'
<i>Penundaan Pembahasan di DPR</i>	109	1. 'Bukan Menolak, Baleg DPR RI Hanya Menunda Pembahasan RUU Penyiaran: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran', 2. 'Baleg DPR RI Tunda Pembahasan RUU Penyiaran', 3. 'Timbulkan Kontroversi, Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran'
<i>Aksi Demo Jurnalis dan Mahasiswa</i>	99	1. 'Jurnalis dan Organisasi Wartawan Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran', 2. 'Massa Aliansi Jurnalis Hingga Mahasiswa Gelar Aksi Demo Tolak RUU Penyiaran di Depan Gedung DPR', 3. 'Jurnalis hingga mahasiswa gelar aksi tolak RUU Penyiaran di DPR'

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
<i>Larangan Jurnalisme Investigasi</i>	99	1. 'RUU Penyiaran malahindungi penjahat karena investigasi jurnalistik dibatasi, kita harus tolak aturan ini', 2. 'Jangan sampai RUU Penyiaran melindungi penjahat dengan melarang investigasi jurnalistik', 3. 'RUU Penyiaran yang melarang investigasi jurnalistik itu salah besar'
<i>Kebingungan Status dan Keberlanjutan RUU Penyiaran</i>	68	1. 'Lagi dampingin anak didik ikut sosialisasi OSN provinsi SD SMP lewat live youtube... tiba2 ngelag agak lama tayangannya. Trus w buka kolom chat, di tempat lain juga ngelag katanya. Scroll2 live chatnya lagi, terus nemu komen2 ini :) "Belum bayar kuota" "Efek RUU penyiaran", 2. 'RUU penyiaran udah belum?', 3. 'ngakak liat epyepe si andovi ngomel2 ttg kaesang ngacak2 MA + org marah2 di pajak kanan kiri depan blakang kek tapera. puas2 in dh tu buat konten begitu sbml RUU penyiaran di sah in kg bs lgi dah buat konten bgini di tambah lgi pemerintah pindah ke IKN'
<i>Perluasan Wewenang KPI ke Konten Digital</i>	59	1. 'RUU Penyiaran yang tengah dibahas oleh DPR RI untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menuai kritik karena dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi dan menyensor konten digital.', 2. 'Di mana pasal dalam RUU Penyiaran yang memberi kewenangan lebih kepada KPI? Melalui Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 17 revisi UU Penyiaran, KPI yang selama ini mengawasi TV dan radio akan diperluas untuk mengawasi konten digital juga.', 3. 'Lagi rame nih, Revisi RUU Penyiaran yang dibahas DPR. Aturan baru ini dianggap mengekang kebebasan dan kreativitas kreator konten. Salah satu pasalnya mewajibkan platform digital seperti YouTube dan TikTok buat verifikasi konten ke KPI. Gimana nih, pendapat kalian?'
<i>Liputan Media tentang Kebebasan Pers</i>	57	1. 'Draf RUU Penyiaran dinilai mengancam kebebasan pers, membatasi informasi publik dan keberagaman konten digital. #Humaniora #AdadiKompas', 2. 'Draf RUU Penyiaran dinilai mengancam kebebasan pers, membatasi informasi publik dan keberagaman konten digital.', 3. 'Draf RUU Penyiaran dinilai mengancam kebebasan pers, membatasi informasi publik dan keberagaman konten digital.'
<i>Kekhawatiran Dampak Pengesahan RUU Penyiaran</i>	54	1. 'RUU Penyiaran masih belum di sahkan tapi pembungkaman media udah banyak terjadi. Ini Indonesia mau dibawa kemana si arah nya', 2. 'Jika RUU penyiaran disahkan. #tolakruupenyiaran', 3. '6 HARI LAGI MENUJU PEMBAHASAN RUU PENYIARAN OLEH BALEG DPR RI #TolakRUUPenyiaran #TolakRUUPenyiaran #TolakRUUPenyiaran #TolakRUUPenyiaran'
<i>Solidaritas Jurnalis Daerah</i>	52	1. 'Ancam Kebebasan Pers, Jurnalis Sumbar Tolak RUU Penyiaran'

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
<i>Respons PDIP terhadap RUU Penyiaran</i>	44	1. 'Respons Ketua DPR Puan Maharani soal Kritik Megawati Terkait Kontroversi RUU Penyiaran'
<i>Komitmen Komisi I DPR RI terhadap Kebebasan Pers</i>	36	1. 'Salut Komisi I DPR RI, berani transparan soal RUU Penyiaran dan tetap jaga kebebasan pers', 2. 'Komisi I DPR RI Pastikan RUU Penyiaran Tidak Mengancam Kebebasan Pers Tetap Terjamin #KebebasanPersTerjamin', 3. 'Komisi I DPR RI Pastikan RUU Penyiaran Tidak Mengancam Kebebasan Pers Tetap Terjamin #KebebasanPersTerjamin'
<i>Polemik Kebijakan Tapera</i>	34	1. 'Yg bikin UU tapera 2016 ? Yg di salahin Pemerintah? bikin PP kan sesuai UU. Ini sama seperti revisi RUU Penyiaran, masa sih nyalahin Pemerintah? faktanya yg revisi itu siapa? Utk Tapera harusnya DPR 2024 panggil DPR 2016. Seperti kagak nyambung jika panggil Pemerintah', 2. 'btw kalian ngeh ngga kenapa om ini udh sampe bersuara di x? karna secara langsung kebijakan yg dikeluhkan (RUU Penyiaran) ini akan berdampak ke mata pencahariannya. Sekarang coba bayangin nasib masyarakat kecil terutama dari kalangan menengah kebawah yang dampaknya ngga cuma dari satu kebijakan aja? udahmah pendidikan mahal, nyari kerja susah, kesejahteraan sulit, pajak mencekik, eh udh kerja masih harus kepotong ama yg baru rame Tapera itu. BAJINGAN!', 3. 'Oh jadi begitu.. Pantas sekian tahun gak diusut... Diusut usut barengan sama. 271 T , Dan Bansos 479 yg gak jelas, maksi gratis gak jelas, RUU penyiaran, Tapera.. Jangan2 kemarin UKT itu juga sama ya utk tenggelamkan semua issue yg lebih besar #TAPERANfaedah #TAPERANfaedah'
<i>Aktivitas Anggota Komisi I DPR RI</i>	28	1. 'Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I DPR.', 2. 'Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah menyoroti Regulasi Multiplatform, Teknologi Artificial Intelligence (AI) hingga kualitas berita dan tantangan TVRI, RRI dan ANTARA. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Penyiaran, Senin (10/3/2025). Sarifah Ainun Jariyah meminta Kementerian Komdigi memastikan keseimbangan antara regulasi konten multiplatform dan kebebasan berekspresi, serta tidak menghambat inovasi industri kreatif digital. Sarifah Ainun Jariyah juga menyoroti beberapa tantangan Lembaga Penyiaran Publik yakni TVRI dan RRI, juga Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. #PDIPerjuangan #MenangkanRakyat #SatyamEvaJayate #KebenaranPastiMenang #SolidBergerak', 3. Komisi I DPR RI: RUU Penyiaran Libatkan Partisipasi Publik Keputusan DPR RI yang melakukan penundaan sementara pembahasan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Mendapat dukungan dan apresiasi dari Organisasi Wartawan. #TVRParlemen #DPRRI'

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
<i>Peran Jokowi & Prabowo</i>	25	1. 'Dan mengulik lg ke post awal, ini ttg RUU PENYIARAN dan ini hasil dari Legislatif dan Eksekutif. Jd ini dah bs bnyk lobi2 baru klo ada pemerintahan baru. Krn ini bukan dari Jokowi aja yg bahas RUU ini. Jd keberlanjutan nya ga murni disini krn bukan produk presiden aja RUU ini', 2. 'Ini blom tentu loh bu/pak. Semua bisa berubah; Ini ibu/bapak mau bilang Tuhan pun ga bs ngubah; Bahkan utk hal2 yg blom terjadi sekalipun. Lagian saya ga bela siapa2 loh; Ini saya cm lg bahas, knp kita blom bs kritik pendukung prabowo di pemilu lalu, utk RUU penyiaran ini.', 3. 'Emg dasarnya mereka ini g paham kalo pak jokowi dan pak prabowo itu jls bgt sekubu. Toh pak prabs bilang sendiri kalo persiapan pilpres dibantu sm pak jokowi, trs ya masa pak jokowi ga dapet feedback si. Cth aja ni RUU penyiaran, yg bikin pak jkwi tp pak prabs bakal untung jg toh'
<i>Topik Lain yang Tidak Terklasifikasi</i>	1212	-

Tabel 2. Representasi Topik Perbincangan RUU Penyiaran di X



Gambar 5. Jejaring Aktor dalam Percakapan RUU Penyiaran di X

Dengan topik-topik perbincangan yang sudah dibahas tersebut, pendalaman perihal siapa yang membicarakan juga dilakukan. Menggunakan *Social Network Analysis*, ditemukan beberapa pembicara menarik. @ARSIPAJA merupakan akun yang paling sentral dan besar dalam pembicaraan dan amplifikasi RUU Penyiaran, mayoritas dari benang yang ada merupakan tanggapan dari satu postingan oleh akun lain. Hal ini menunjukkan organiknya pembicaraan RUU Penyiaran dan isu-isu yang terkait dengannya. Kemudian terdapat @grok, AI bawaan dari twitter, dimana sering digunakan warganet untuk menjelaskan sebuah topik atau isu, dalam kasus ini tentu isunya adalah RUU Penyiaran. Namun, di bagian kanan terdapat satu user yang besar dan tidak terhubung dengan jaringan sentral, yakni @brfelindra.

Eksistensi buzzer di media sosial sudah tidak bisa diganggu gugat, nyatanya di tahun 2014, 2019, dan 2024 penggunaan buzzer sangat prevalen terutama dalam masa-masa pemilu (Wulandari dkk., 2023; Idris & Fahlevi, 2022; Ibrahim, 2025). Selain kepemiluan, seringkali buzzer dikerahkan untuk kepentingan citra suatu program pemerintah, dan dalam kasus ini @brfelindra menjadi buzzer paling aktif dalam pengaungan citra positif perihal RUU Penyiaran dan pemerintah. Ketimpangan antara jumlah komentar, repost dan like di post akun terkait perihal RUU Penyiaran menjadi hal penting dalam identifikasi buzzer. Dengan ratusan komen dari akun-akun yang memiliki rekam jejak pengaungan citra positif juga komen-komen mereka di post terkait yang secara relatif sama dalam menyampaikan substansi pula nada yang divokalkan.



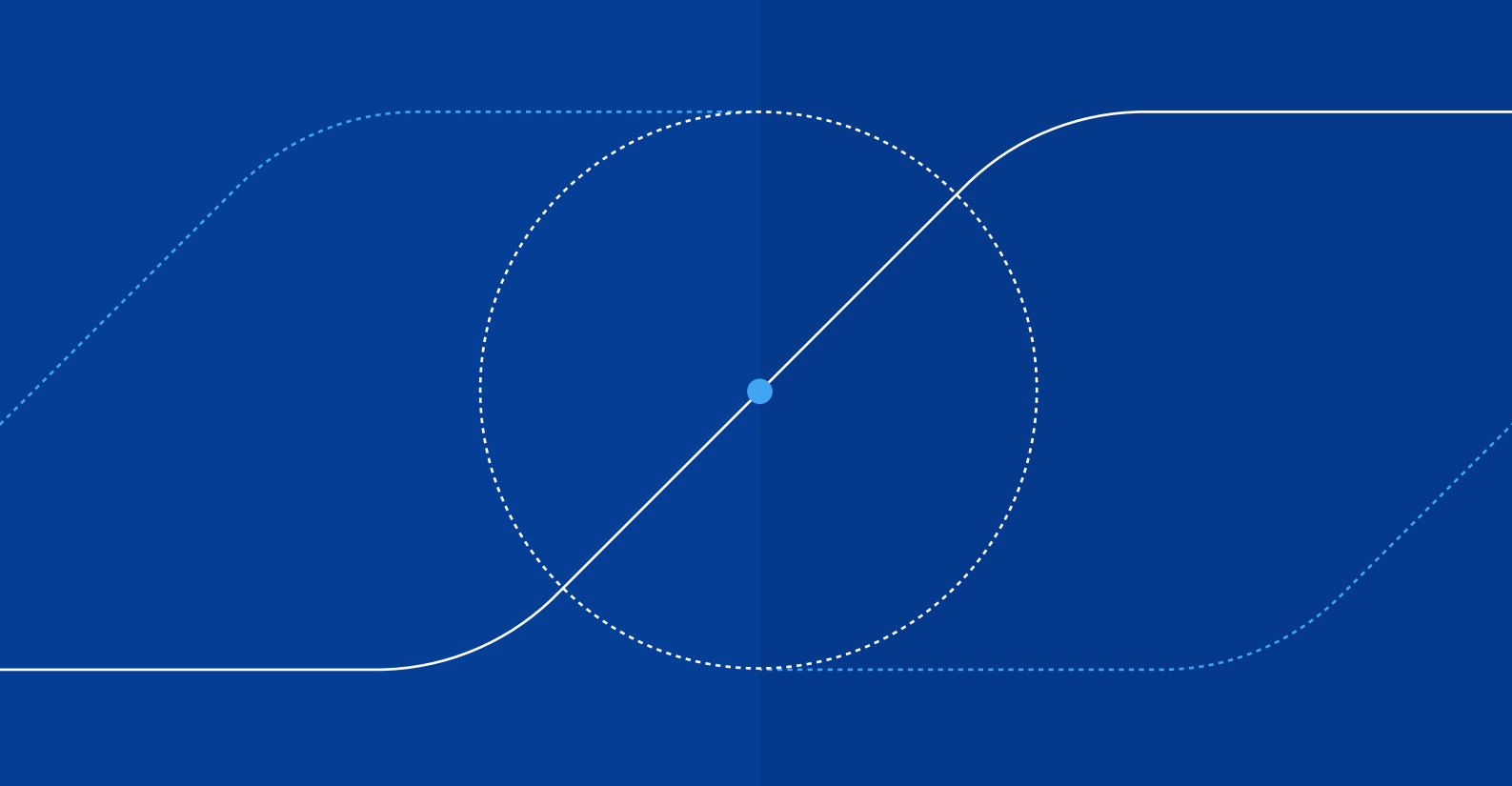
Gambar 6. Contoh Unggahan Akun @brfelindra



Gambar 7. Contoh Unggahan Akun @brfelindra



Mobilisasi Isu oleh Kreator Konten di TikTok

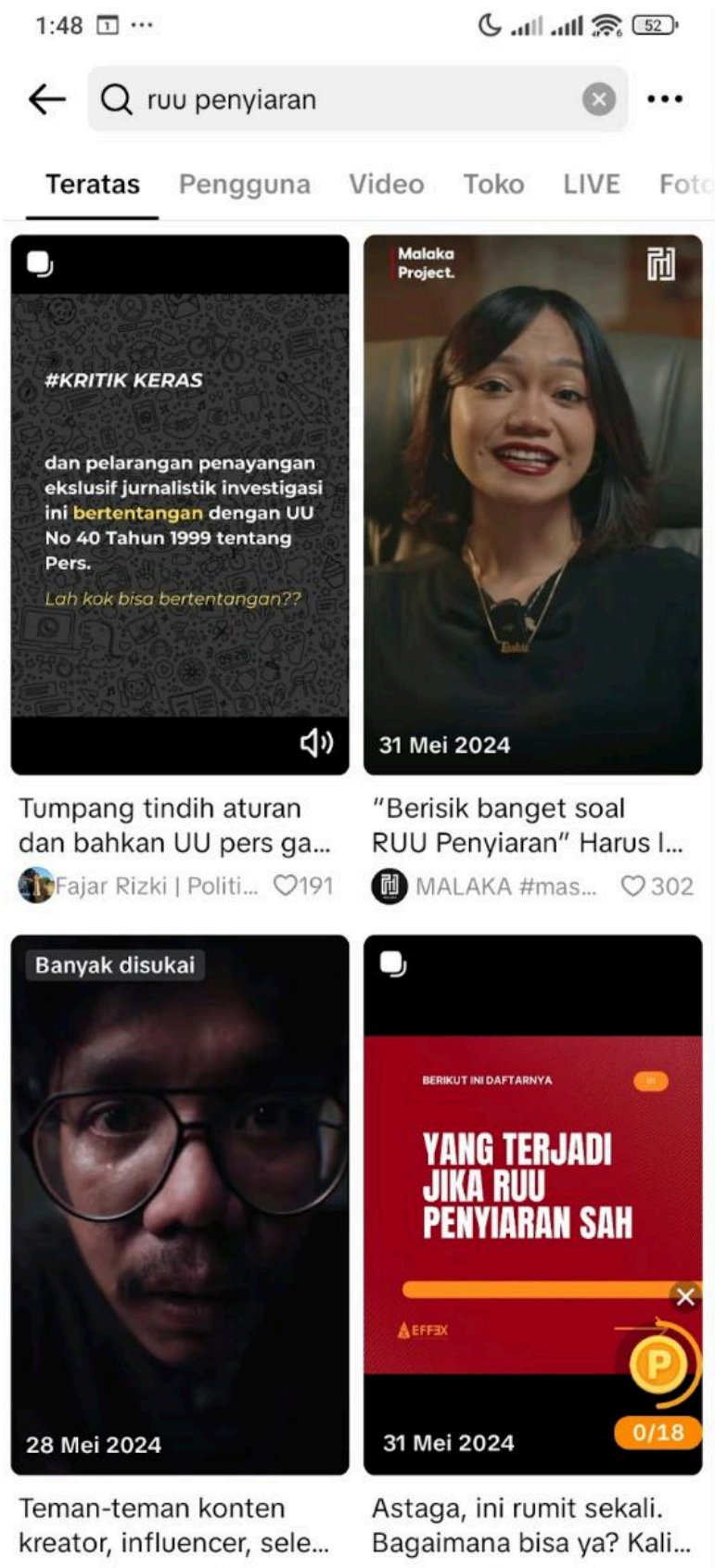


TikTok merupakan salah satu platform dengan risiko paling rentan terhadap pengaturan platform dalam RUU Penyiaran. TikTok sendiri sepertinya menyadari risiko tersebut dan konsisten menjadi salah satu platform yang paling vokal dalam mengkritik dan menolak skema pengaturan platform dalam RUU Penyiaran. Pada pertengahan 2025, TikTok melalui Head of Public Policy and Government-nya menyatakan bahwa pengaturan platform dalam RUU Penyiaran menambah lapis aturan yang tidak perlu (Khalida, 2026). Sebab, platform seperti TikTok sebenarnya sudah diatur melalui kebijakan moderasi konten pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengaturan platform tambahan oleh RUU Penyiaran berpotensi menghambat model bisnis TikTok dan aktivitas penggunaannya.

Selain pihak manajemen TikTok, pengguna dan kreator konten di TikTok sendiri aktif menyuarakan kritik terhadap RUU Penyiaran selama satu tahun terakhir. Dalam diskusi tentang RUU Penyiaran, kreator konten menjadi aktor yang aktif memobilisasi diskusi. Hal ini dapat dilihat dari pola diskusi yang terjadi pada Maret-Mei 2024, momen ketika draf RUU Penyiaran muncul di publik. Beberapa kreator konten dengan jumlah pengikut besar; seperti Ferry Irwandi, Bintang Emon, dan Malaka Project; turut aktif dalam memantik diskusi tentang RUU Penyiaran di platform TikTok. Para kreator konten dengan jumlah pengikut banyak ini juga diikuti oleh kreator lain dengan segmentasi penonton yang lebih spesifik dan akun media pemberitaan, seperti Tempo, WinNews, atau @angewwie yang secara spesifik menargetkan audiens dengan minat pada isu publik dan politik.

Meskipun disuarakan oleh kreator konten yang berbeda-beda, tiap-tiap konten memiliki deskripsi isu dan penekanan yang kurang lebih sama. Mereka semua secara spesifik menekankan bahwa RUU Penyiaran sangat mungkin memengaruhi pekerjaan kreator konten. Selain itu, dalam konteks yang lebih besar, RUU Penyiaran juga sangat mungkin memengaruhi ekosistem penggunaan platform oleh pengguna. Penekanan tentang dampak RUU Penyiaran terhadap penggunaan platform ini secara spesifik dikaitkan dengan ketentuan tentang perluasan kewenangan KPI. Beberapa kreator konten tampak memaparkan rekam jejak KPI dalam mengatur konten siaran media konvensional, seperti TV dan radio, yang diwarnai oleh sensor berlebihan dan cenderung dipenuhi pertimbangan moral. Mereka memaparkan skenario alternatif yang mengajak warganet di TikTok untuk membayangkan betapa terbatasnya akses konten apabila KPI mengatur platform media sosial. Penyebaran konten dengan substansi semacam ini membuat warganet di TikTok menanggapi isu RUU Penyiaran dengan kritisisme yang praktikal, seperti kekhawatiran akan akses terhadap fitur-fitur TikTok yang selama ini sudah menjadi bagian dari keseharian warganet.

Kekhawatiran akan RUU Penyiaran disuarakan dengan metode yang berbeda-beda. Beberapa kreator konten dan media dengan fokus isu publik; seperti Ferry Irwandi, Malaka Project, @angewwie, dan Tempo; menyuarakan isu RUU Penyiaran dengan narasi serius dan cenderung frontal. Substansi dan ketentuan dalam RUU Penyiaran yang berpotensi mengganggu ekosistem ekonomi kreatif di TikTok, seperti pengaturan konten oleh KPI, disampaikan secara jelas dan terbuka. Hal ini sedikit berbeda dengan beberapa kreator konten yang memiliki latar belakang dan fokus konten yang cenderung jenaka, seperti Bintang Emon dan @firufd, lebih memilih untuk menyuarakan RUU Penyiaran dengan metode satir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keresahan atas RUU Penyiaran disuarakan secara kontekstual oleh tiap-tiap kreator konten, sesuai dengan fokus dan karakteristik konten mereka.



Gambar 8. Rangkaian Unggahan Kreator Konten TikTok tentang RUU Penyiaran



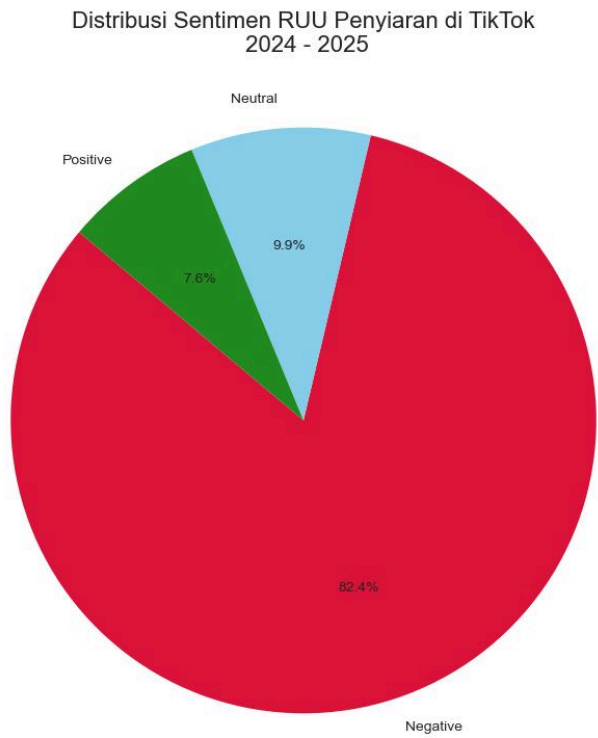
Sumber gambar: TPI

Mobilisasi isu oleh para kreator konten tersebut direspons oleh secara beragam oleh warganet di TikTok. Wacana yang dibentuk oleh mobilisasi isu kreator konten dan warganet di TikTok kemudian membentuk tren dari waktu ke waktu. Berbeda dengan X yang mengalami puncak pembahasan hanya pada pertengahan 2024, TikTok justru mengalami dua puncak pembahasan, yang salah satunya juga terjadi pada 2025. Sejauh ini, ada dua momen ketika percakapan tentang RUU Penyiaran memuncak di TikTok, yakni pada Mei 2024 setelah drafnya muncul pada Maret dan Juli 2025, bersamaan respons keras TikTok terhadap rencana pengaturan platform dalam RUU Penyiaran.

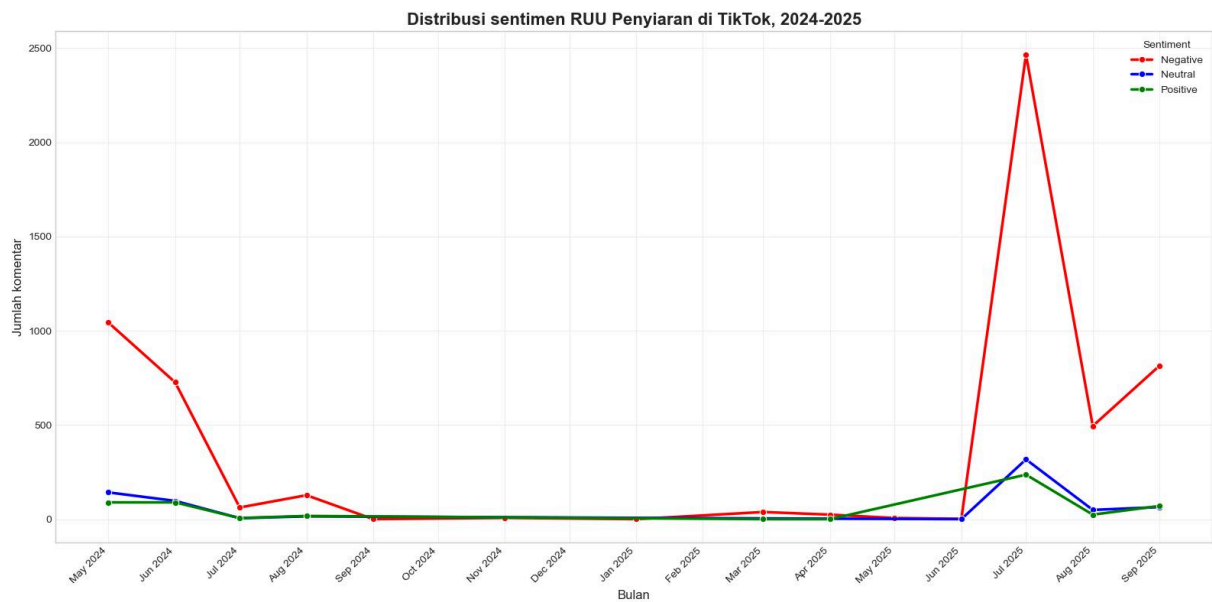
Kami menganalisis distribusi sentimen percakapan publik di TikTok dalam rentang dua periode puncak ini. Sentimen negatif mendominasi percakapan publik tentang RUU Penyiaran selama setahun terakhir, dengan persentase 77,3% dari total 7063 komentar di platform TikTok. Sisanya; sebesar 15% dan 7,6%; merupakan percakapan dengan sentimen netral dan positif. Percakapan dengan sentimen negatif mencapai puncaknya pada Juli 2025, beberapa waktu setelah TikTok menyatakan bahwa mereka menolak untuk diatur oleh RUU Penyiaran. Hal ini merupakan salah satu gejolak unik di platform ini apabila dibandingkan dengan X, yang cenderung minim pembicaraan tentang RUU Penyiaran sepanjang 2025. Kata-kata yang dikategorikan memiliki sentimen negatif, meliputi kata-kata yang merujuk ke pembuat dan pelaksana kebijakan, seperti "DPR" dan "KPI, serta kata-kata yang merujuk ke dampak pengaturan platform seperti "blokir", "pindah" dan "demokrasi".

Kata-kata yang mendominasi komentar dengan sentimen negatif ini mencerminkan beberapa hal. Kata-kata "DPR" dan "KPI" menunjukkan adanya ketidakpercayaan yang besar terhadap pemerintah. DPR, secara spesifik, banyak disebut karena merupakan aktor utama dalam perumusan RUU Penyiaran, yang hingga kini tak banyak melibatkan partisipasi publik. Sementara itu, KPI banyak disebut karena ketidakpercayaan publik terhadap kompetensi mereka dalam meregulasi platform digital. Dua wacana ini sesungguhnya saling berkaitan. Minimnya pelibatan publik membuat desain pengaturan platform yang diusulkan dalam RUU Penyiaran menjadi tidak pernah jelas bagi publik. Saat draf RUU tersebut bocor ke publik, banyak substansi yang kemudian menimbulkan keresahan dan kekhawatiran karena minimnya partisipasi publik tersebut.

Kata "blokir" dan "pindah", yang banyak muncul pada puncak pembahasan 2025, merepresentasikan kekhawatiran akan pemblokiran TikTok dan usulan pindah platform sebagai solusi alternatif. Kekhawatiran akan pemblokiran ini dan usulan pindah platform ini sebenarnya mencerminkan dampak dari kurangnya partisipasi publik dalam RUU Penyiaran. Warganet TikTok, yang tidak memperoleh informasi tentang dampak pengaturan platform dalam RUU Penyiaran, tidak mengetahui bahwa dampak pengaturan tersebut berpotensi menyasar banyak platform sekaligus, bukan hanya TikTok.



Gambar 9. Distribusi Sentimen Percakapan di TikTok, 2024-2025



Gambar 10. Distribusi Sentimen Percakapan di Platform TikTok, 2024-2025



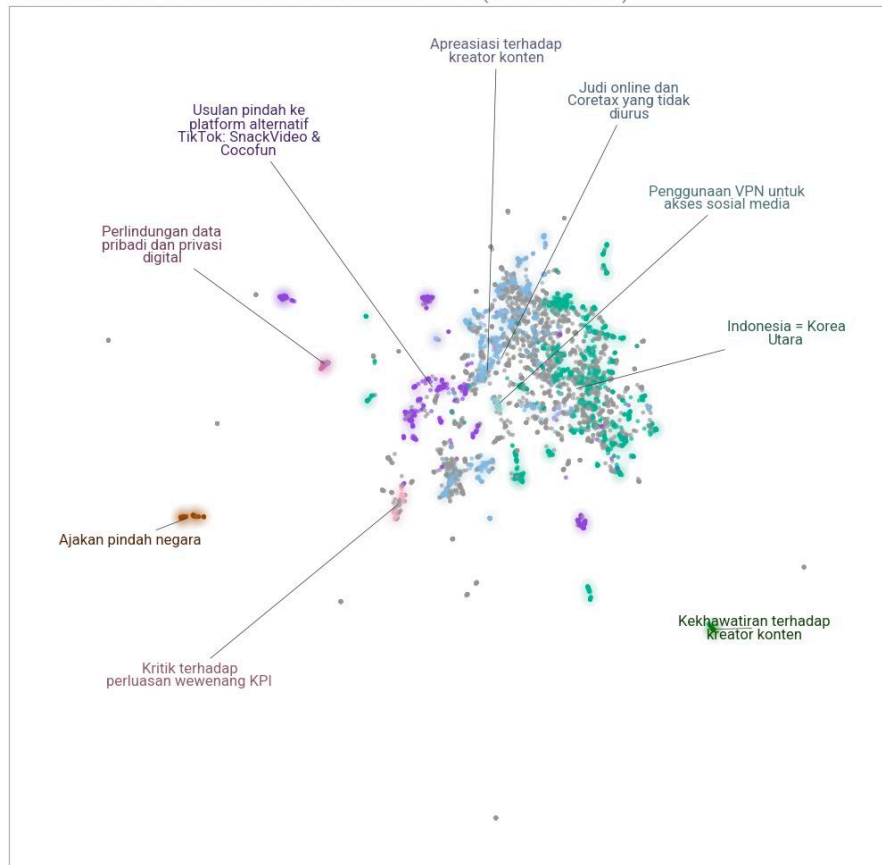
Gambar 11. Wordcloud Sentimen Negatif di TikTok

Selain percakapan tentang aktor yang dominan dalam perumusan RUU Penyiaran dan kekhawatiran akan pemblokiran TikTok, dalam percakapan bersentimen negatif, ada beberapa pembicaraan lain yang membahas tentang kekhawatiran akan kehadiran otoritarianisme digital. Kekhawatiran akan hadirnya otoritarianisme digital salah satunya diekspresikan dengan narasi yang menyamakan Indonesia dengan Korea Utara. RUU Penyiaran, dalam narasi tersebut, dipandang sebagai peraturan yang menambah lapisan tidak perlu terhadap pengawasan ruang digital Indonesia, yang sebelumnya sudah dipandang cukup represif karena UU ITE. Komentar yang berbunyi “lama-lama jadi Korut nih negara”, “menuju korut 2045”, dan “sampe lupa ini Indonesia apa Korut” merupakan representasi akan kekhawatiran publik terhadap hadirnya otoritarianisme digital di Indonesia akibat RUU Penyiaran.

Kekhawatiran akan hadirnya otoritarianisme digital, secara spesifik, berhubungan dengan dominasi KPI dalam RUU Penyiaran. Konten-konten yang menyuarakan tentang keresahan terhadap kemungkinan adanya ketentuan bagi kreator konten untuk meminta izin KPI ditanggapi secara sinis oleh warganet TikTok. Mereka mengulik kembali rekam jejak kontroversial KPI dalam mengatur media konvensional dan menggunakannya untuk mempertanyakan kompetensi mereka dalam mengatur platform digital. Bukan hanya mengulik kontroversi KPI, beberapa warganet di TikTok juga menyatakan bahwa KPI sendiri sebenarnya gagal dalam mengatur media konvensional karena banyaknya siaran televisi dan radio kurang berbobot yang diloloskan oleh KPI. Beberapa komentar, seperti “fungsi KPI?”, “KPI urus dulu tayangan TV”, dan “KPI = Kurang Pemasukkan Intinya” merupakan beberapa contoh narasi yang merepresentasikan ketidakpercayaan terhadap KPI yang diberi wewenang untuk mengatur platform digital dalam RUU Penyiaran. Dengan rekam jejak dan kompetensi yang diragukan, perluasan wewenang KPI dalam RUU Penyiaran banyak dibicarakan sebagai potensi hadirnya otoritarianisme digital di Indonesia.

Topik Perbincangan RUU Penyiaran

Data diambil dari media sosial TikTok Mei 2024-2025 (6333 komentar)



Gambar 12. Topik Perbincangan RUU Penyiaran di TikTok, 2024-2025

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
<i>Indonesia = Korea Utara</i>	1.449	indonesia', 'streak', 'korut', 'api', 'indo', 'like', 'konoha', 'menuju', 'lite', 'emas', 'untung', 'korea', 'bagus', 'ku', 'utara'
<i>Judi Online dan Coretax yang Tidak Diurus</i>	1.128	'blokir', 'judol', 'pajak', 'konten', 'demokrasi', 'aturan', 'menolak', 'dukung', 'kepentingan', 'presiden', 'media', 'masyarakat', 'prabowo', 'perampasan', 'aset'
<i>Usulan Pindah ke Platform Alternatif TikTok: Snack Video dan Cocofun</i>	630	'snack', 'video', 'cocofun', 'youtube', 'demo', 'ig', 'vidio', 'hidup', 'live', 'nonton', 'short', 'download', 'mah', 'kembali', 'akun'

Topik	Jumlah Cuitan	Cuitan yang Merepresentasikan
<i>Kritik terhadap Perluasan Wewenang KPI</i>	118	'kpi', 'pemasukan', 'kurang', 'kpk', 'komisi', 'anda', 'minta', 'perkuat', 'kerjaanlah', 'boskuh', 'menghindari', 'pura', 'syarat', 'chuaks', 'kerja'
<i>Ajakan Pindah Negara</i>	93	'pindah', 'yuk', 'yok', 'yu', 'mending', 'yukk', 'ig', 'pindahh', 'malaysia', 'dah', 'siap', 'mars', 'bawa', 'yt', 'tren'
<i>Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Digital</i>	89	'perlindungan', 'data', 'pribadi', 'jual', 'amerika'
<i>Penggunaan VPN untuk Akses Media Sosial</i>	61	'vpn', 'pake', 'make', 'bahasanya', 'ngerti', 'internet', 'walaupun', 'gpp', 'blokir', 'arab', 'pke', 'cry', 'play', 'store', 'tenang'
<i>Kekhawatiran terhadap Kreator Konten</i>	55	'alhamdulillah', 'anomali', 'doa', 'akhirnya', 'isinya', 'allhamdulillah', 'filistin', 'islama', 'bagikan', 'terkabal', 'musliminal', 'alhamdulillah', 'izzal', 'wal', 'mujahidina'
<i>Apresiasi terhadap Kreator Konten</i>	42	'profesor', 'heist', 'money', 'mirip', 'professor', 'dok', 'lu', 'film', 'nurbianto', 'kyk', 'kayak', 'alvaro', 'yessica', 'vivi', 'teks'
<i>Topik Lain yang Tidak Terklasifikasikan</i>	2431	-

Tabel 3. Representasi Topik Perbincangan RUU Penyiaran di TikTok

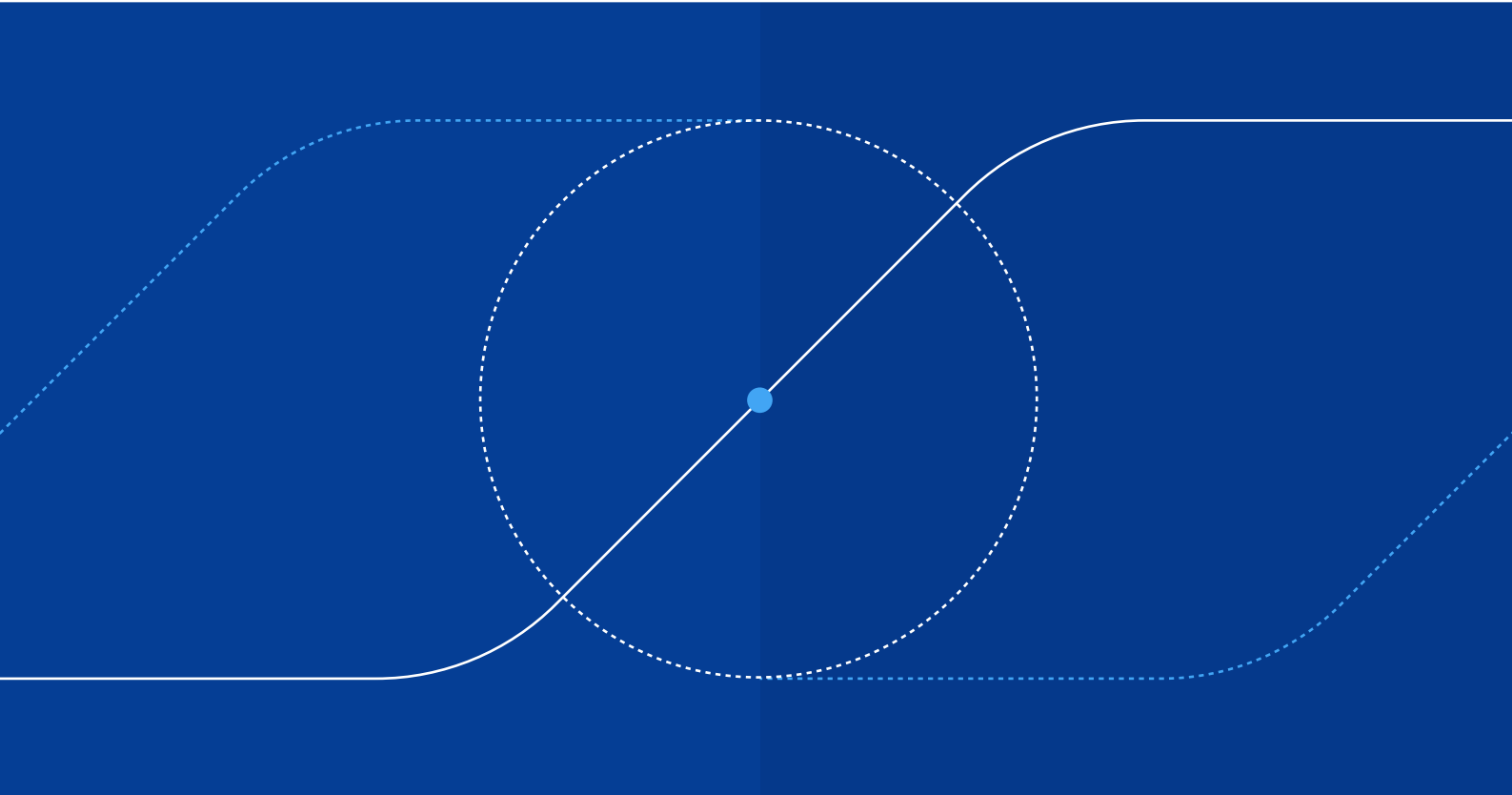
Di luar perbincangan selama periode puncak, ada topik-topik pembicaraan lain di TikTok tentang RUU Penyiaran. Analisis pemodelan topik kami terhadap 7063 komentar di TikTok menemukan setidaknya ada 10 topik pembicaraan utama. 5 dari 10 topik sudah mencuat pada dua periode puncak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni kritik terhadap KPI, Indonesia = Korea Utara, ajakan pindah negara, keterkaitan RUU Penyiaran dan isu kebijakan lainnya, dan usulan pindah platform. Topik lain yang muncul adalah adanya dukungan terhadap kreator konten yang aktif menyuarakan isu publik, yang berbentuk apresiasi dan kekhawatiran. Kreator konten Ferry Irwandi, misalnya, menerima banyak komentar di unggahannya yang membahas tentang RUU Penyiaran, yang khawatir akan keberlangsungan bisnisnya sebagai kreator konten. Selain khawatir, banyak warganet TikTok yang juga mengapresiasi karena, selain aktif bersuara tentang RUU Penyiaran, juga aktif bersuara tentang isu-isu publik lainnya.

Hasil pemodelan topik terhadap komentar-komentar TikTok ini juga menunjukkan pola yang berbeda dari X. Apabila narasi tentang RUU Penyiaran di X cenderung tersebar dan tidak koheren, hasil pemodelan topik TikTok justru menunjukkan bahwa pembahasan tentang RUU Penyiaran cenderung koheren dan terpusat. Kluster-kluster pembahasan tampak tidak begitu jauh dan terpisah, menunjukkan bahwa perbincangan tentang RUU Penyiaran di TikTok cenderung terkoordinasi dengan baik, dengan pusat koordinasi berada pada akun-akun kreator konten.

Keterpusatan ini memperlihatkan bahwa wacana di TikTok banyak berputar di sekitar kreator konten yang menjadi penggerak utama pembahasan. Hal ini tampak terutama dalam beberapa tema, seperti “kekhawatiran terhadap kreator konten” dan “kritik terhadap perluasan wewenang KPI”. Tema-tema lain, seperti “perlindungan data pribadi”, “penggunaan VPN”, serta “ajakan pindah negara” muncul sebagai percabangan dari perbincangan utama tersebut, bukan sebagai diskursus yang benar-benar terpisah. TikTok tampak menjadi ruang di mana resistensi terhadap RUU Penyiaran terartikulasikan melalui solidaritas antar kreator konten, bukan melalui diskursus politik yang terfragmentasi seperti di X.



Kesimpulan



Secara umum, analisis terhadap respons warganet di X dan TikTok menunjukkan bahwa perbincangan tentang RUU Penyiaran di media sosial tidak hanya merefleksikan kekhawatiran terhadap isi kebijakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana karakteristik sosial dan teknologis dari masing-masing platform memengaruhi bentuk mobilisasi isu. Di X, diskursus cenderung bersifat sporadis, fragmentaris, dan bercampur dengan wacana kebijakan lain seperti Tapera, TNI, atau RKUHP. Pola ini menandakan adanya koneksi antarsu yang kuat, tetapi dengan derajat koherensi yang rendah. Kehadiran buzzer dan akun-akun partisan memperumit struktur percakapan, menghasilkan lanskap wacana yang terpolarisasi dan cenderung tidak terfokus. X dengan demikian menjadi ruang bagi ekspresi politik yang kritis, tetapi juga mudah dimanipulasi oleh aktor politik untuk mengacaukan fokus perdebatan.

Sementara itu, TikTok memperlihatkan pola yang hampir berlawanan. Diskursus tentang RUU Penyiaran di platform ini lebih terkoordinasi, terpusat, dan berfokus pada dampak langsung terhadap kebebasan berekspresi serta posisi kreator konten sebagai pihak yang paling terdampak. Kreator konten dan akun media pemberitaan berperan sebagai penggerak utama narasi, memunculkan bentuk mobilisasi isu yang lebih organik dan berakar pada solidaritas antara kreator konten dan audiensnya dalam memperjuangkan

ekosistem platform mereka. Koherensi topik dan keterpusatan diskursus menunjukkan bahwa resistensi terhadap RUU Penyiaran di TikTok tidak sekadar bersifat emosional, tetapi juga terbentuk melalui kesadaran kolektif terhadap ancaman struktural terhadap ekosistem ekonomi kreatif digital. Dengan demikian, respons warganet terhadap RUU Penyiaran, baik di X maupun TikTok, memperlihatkan dua bentuk resistensi digital yang berbeda: yang pertama bersandar pada politik wacana dan yang kedua pada solidaritas komunitas.

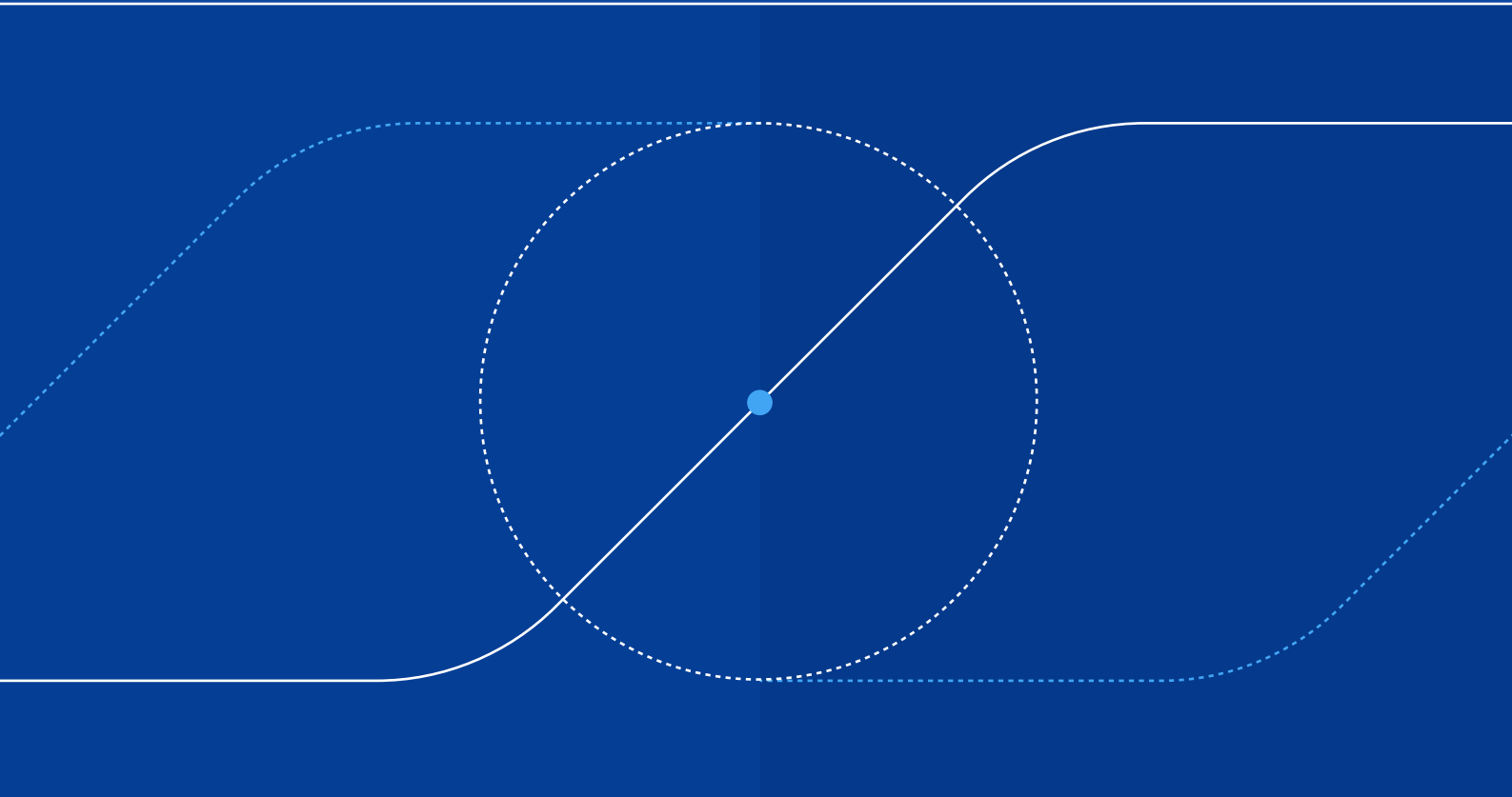
Meskipun karakteristik perbincangan di X dan TikTok berbeda, keduanya menunjukkan kesamaan substansial dalam isu yang paling sering disuarakan. Kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi, ancaman terhadap jurnalisme, serta perluasan wewenang KPI muncul secara konsisten di kedua platform. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa resistensi warganet terhadap RUU Penyiaran bukanlah reaksi sesaat atau terbatas pada satu komunitas digital, melainkan bentuk kekhawatiran publik yang lebih luas terhadap potensi kemunduran demokrasi digital di Indonesia. Kesamaan pola ini menjadi sinyal kuat bahwa isu yang disuarakan oleh warganet merupakan persoalan mendesak yang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pembuat kebijakan, agar regulasi penyiaran tidak justru membatasi ruang kebebasan berekspresi yang telah tumbuh di ekosistem digital nasional.



Sumber gambar: Antara News Kalteng



Referensi



- Ayuningtyas, F. (2024). *Fenomena buzzer di media sosial jelang Pemilu 2024 dalam perspektif komunikasi politik*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/FitriaAyuninpublication/371684161_Fenomena_Buzzer_Di_Media_Sosial_Jelang_Pemilu_2024_Dalam_Perspektif_Komunikasi_Politik
- Fahmi, I. (2024). *Soeharto di mata warganet: Semua positif kecuali di X*. <https://pers.droneemprit.id/soeharto-di-mata-warganet-semua-positif-kecuali-di-x/>
- European Commission. (2025). *Commission press release IP/25/2934*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2934
- Hukumonline. (2024). *Komdigi tegur ketiga platform X atas denda konten pornografi, pakar: Langkah tegas tapi tidak represif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/komdigi-tegur-ketiga-platform-x-atas-denda-konten-pornografi--pakar--langkah-tegas--tapi-tidak-represif-lt68fa97087908b/>
- Katadata. (2024). *Komdigi keluhan X (Twitter) tak kunjung bikin kantor di RI, pernah ancam blokir*. <https://katadata.co.id/digital/teknologi/68ae9024284d6/komdigi-keluhkan-x-twitter-tak-kunjung-bikin-kantor-di-ri-pernah-ancam-blokir>
- Khalida, M. S. (2025, 15 Juli). *TikTok minta platform digital tidak diatur dalam RUU Penyiaran*. ANTARA News Jambi. <https://jambi.antaranews.com/berita/622161/tiktok-minta-platform-digital-tidak-diatur-dalam-ruu-penyiaran>
- Komisi Digital Indonesia. (2024). *Komdigi terbitkan teguran ketiga kepada platform X atas ketidakpatuhan pembayaran denda konten pornografi*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-terbitkan-teguran-ketiga-kepada-platform-x-atas-ketidakpatuhan-pembayaran-denda-konten-pornografi>
- RRI. (2024). *Komisi I minta Twitter/X patuhi UU ITE Indonesia*. <https://rri.co.id/nasional/1879858/komisi-i-minta-twitter-x-patuhi-uu-ite-indonesia>
- Statista. (2024). *Number of active Twitter users in selected countries*. <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>
- Subasi, C., Güler, M., & Usta, E. (2016). *How social media usage affects political efficacy: A study on Twitter, Facebook and YouTube*. IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/7395825>
- Tirto.id. (2024). *Kata Menkomdigi soal X tak punya kantor perwakilan di Indonesia*. <https://tirto.id/kata-menkomdigi-soal-x-tak-punya-kantor-perwakilan-di-indonesia-hgDT>
- Viva.co.id. (2024). *Hasil penelitian: Netizen X paling pintar, TikTok duduki peringkat terendah*. <https://www.viva.co.id/digilife/1747341-hasil-penelitian-netizen-x-paling-pintar-tiktok-duduki-peringkat-terendah>
- Widodo, A., & Rahmawati, D. (2023). *Kampanye Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2019: Efektivitas Penggunaan Buzzer di Media Sosial*. *Journal of Public Relations and Media Communication*. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/JPRMEDCOM/article/view/6544>



FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
UNIVERSITAS GADJAH MADA
ROOM BC 201-203, BC BUILDING 2nd FLOOR
JALAN SOCIO YUSTISIA 1
BULAKSUMUR, YOGYAKARTA, 55281 INDONESIA

PHONE : (0274) 563362, Ext. 116 | +62 838 6969 8181 (WHATSAPP)
EMAIL : cfds.fisipol@ugm.ac.id
WEBSITE : digitalsociety.id

 facebook.com/cfdsugm
 [cfds_ugm](https://www.youtube.com/c/cfds_ugm)

 [Center for Digital Society \(CfDS\)](https://www.linkedin.com/company/Center-for-Digital-Society-(CfDS)-UGM)
 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://www.youtube.com/c/cfds_ugm)
 [cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)